



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I (satu)
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Calon Anggota BPK RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 2 September 2019
Waktu : 19.00 WIB – 22.16 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
Ketua Rapat : Melchias Markus Mekeng
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono
Acara : Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI

Hadir : CALON ANGGOTA BPK RI
1. **Ir. H. ACHMADI NOOR SUPIT**

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MELCHIAS MARKUS MEKENG):

Yang terhormat saudara Achmadi Noor Supit sebagai calon anggota BPK.

Kami berikan waktu 45 menit untuk *fit and proper* ini 15 menit menjelaskan tentang pandangan dan yang ingin disampaikan tentang BPK, 15 menit kami akan berikan kepada anggota, setelah itu 15 menit untuk dijawab. Kalau misalnya masih ada yang belum selesai dijawab nanti dijawab secara tertulis. Kami persilakan ini menurut jam 19.58 WIB, jadi tambah 45 menit.

Silakan.

CALON ANGGOTA BPK RI (Ir. H. ACHMADI NOOR SUPIT):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan sidang, dalam hal ini langsung dipimpin oleh Ketua Komisi XI,

Yang terhormat saudara-saudara anggota dewan Komisi XI yang pada hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan persepsi saya, pemahaman saya tentang BPK dikaitkan dengan tugas dan kewenangannya dalam upaya men-*support* tercapainya tujuan negara.

Saya mencoba untuk menyajikan paparan ini waktu yang disiapkan adalah 15 menit. Saya sudah menyiapkan satu naskah dan mudah-mudahan sudah diterima semuanya. Saya coba dengan urutan-urutan sebagai berikut, ada pendahuluannya yang memuat tentang tujuan NKRI, posisi dan peran strategis BPK, ...(suara tidak jelas)... konstitusional dan undang-undang ...(suara tidak jelas)... keuangan negara. Yang kedua tentang visi misi calon anggota BPK, kondisi terkini, tantangan dan peluang, rencana aksi dan usulan, solusi dan penutup. Jadi karena waktu 15 menit saya mencoba bisa menyampaikan hal-hal yang menurut saya penting untuk saya sajikan pada malam hari ini.

BPK sebagai lembaga tinggi negara, salah satu lembaga tinggi negara, dari lembaga tinggi negara yang lain diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Atau kita lihat tujuan negara itu apa, tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Posisi dan peran strategis BPK itu sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa pemeriksaan,

pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan melalui suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. BPK mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis dalam rangka memastikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berjalan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan guna mencapai tujuan negara sesuai undang-undang dasar. Oleh karenanya BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan semata tapi juga turut bertanggung jawab atas terselenggaranya pembangunan nasional dan tata kelola Pemerintahan yang semuanya bermuara pada tujuan negara.

Ada tiga jenis pemeriksaan di BPK dalam rangka melaksanakan tugasnya itu:

1. Pemeriksaan keuangan
Outputnya adalah opini, apakah itu WTP, WDP, maupun TMP.
2. Pemeriksaan kinerja
Outputnya rekomendasi perbaikan kinerja.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Outputnya adalah laporan hasil pemeriksaan kesimpulan tentang kesesuaian objek yang diperiksa dan kriteria tertentu.

Tetapi disini jarang sekali ada, ada *outcome* yang dituntut bangsa dan negara ini. Apakah hasil pemeriksaan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu itu kemudian bisa dilihat langsung, bisa dinilai langsung untuk kepentingan tujuan negara itu. Itu hal-hal yang saya lihat sementara ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan kedepan. Nah landasan hukumnya kita sudah tau ada Undang-Undang Dasar, kemudian ada Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Undang-Undang 15 tahun 2000 tentang Pemeriksaan, Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang BPK. Saya langsung saja kondisi terkini, kalau kita lihat objek yang diperiksa BPK itu terutama APBN dan APBD, atau keuangan negara dimanapun dia berada, apakah di Pemerintahan, di kementerian dan lembaga, di badan, di pusat dan di daerah, di BI, di BUMN, yang ada uang negaranya itu adalah tanggung jawab untuk diperiksa oleh BPK pengelolaan dan tanggung jawabnya.

Nah, kalau kita lihat sementara ini, kita lihat apa yang dilakukan, kalau APBN itu ada penerimaan negara yang dibicarakan, kita membicarakan penerimaan negara, kita membicarakan tentang pengeluaran negara, kita membicarakan tentang pembiayaan atau defisit yang menutup yang itu semuanya dari utang. Tapi apakah ada audit atau pemeriksaan istilahnya, karena istilah di dalam undang-undang masih pemeriksaan, dilakukan terhadap perencanaan penerimaan negara. Apakah ada audit tentang perencanaan pembiayaan, karena pengeluarannya lebih besar ada defisit ada hutang disana. Padahal kita membutuhkan bahwa opini proposal tentang perencanaan penerimaan barang itu sangat penting untuk menjamin bahwa negara ini semakin lama semakin maju kedepan. Ada jaminan sumber-sumber penerimaan negara itu semakin tahun itu harus bertambah untuk bisa mempercepat negara ini

menuju pada tujuannya. Nah kalau dari data-data yang saya lihat yang dilakukan oleh BPK disini dari jumlah laporan hasil pemeriksaan BPK periode 2009-2018 saja sebanyak 13.000 lebih laporan hasil pemeriksaan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu ada sekitar 4000 (36%), pemeriksaan dengan laporan keuangan ada 6000 sekitar 48%, pemeriksaan tentang kinerja 2000 atau 16%. Tetapi kalau kita lihat sementara ini, jaminan tentang penerimaan negara itu hampir dikatakan sulit dicapai, kenapa? *Tax ratio* misalnya itu kan penerimaan negara itu lebih besar dari pajak, *tax ratio* itu ketika kita masih ada GBHN dulu, eh masih ada ya Garis Besar Haluan Negara tahun 2017 saya masih ingat, ada target di GBHN *tax ratio* itu harus sudah mencapai 14% pada saat itu, tapi kan kemudian kita krisis memang pada tahun 99, 98-99, jadi *tax ratio* nya setelah itu menurun, baru 2016 dia *tax ratio* nya sekitar 10% atau 10,4% kalau tidak salah. Dan 2019, *tax ratio* kita itu adalah sekitar 12,4% itupun karena ada *tax amnesty* jadi penerimaan perpajakan kita meningkat pada saat karena ada *tax amnesty*. Tapi apakah ada jaminan kemudian bahwa itu akan meningkat terus karena apa kalau kita lihat seharusnya *tax ratio* itu sudah mencapai angka 14-15% dalam keadaan negara ini pada saat seperti ini apalagi dibandingkan dengan negara-negara sekitar kita, kita relatif sangat kecil. Nah jaminan sumber-sumber penerimaan negara itu mestinya BPK melakukan audit sehingga kita bisa merasakan kita akan mendapatkan suatu kepastian bahwa sumber-sumber penerimaan negara ini terjaga, jadi apapun kebijakan yang dilakukan Pemerintah harus menjaga sumber-sumber penerimaan negara ini kedepan harus terjamin semakin bagus, semakin baik dan semakin baik sehingga kita tau kira-kira penerimaan negara pada sekian tahun perlu waktu lima tahun kedepan itu sudah seperti apa *tax ratio* nya sudah seperti apa. Itu satu hal yang saya usulkan untuk dilakukan audit.

Yang kedua, tentang pembiayaan tentang hutang, karena hutang kita itu sudah mencapai 5300 Triliun lebih. Kalau tidak dilakukan audit terhadap perencanaan hutang, negara ini walau sekarang masih batas 36% itu masih dianggap batas, belum terlalu tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain ada yang sudah mencapai 100% lebih karena hutang dalam negeri. Tetapi tetap harus ada audit karena BPK itu bukan saja bertanggung jawab memeriksa pengelolaan tapi ada tanggung jawabnya kalau keuangan dikaitkan dengan tujuan bernegara karena ini adalah lembaga tinggi negara, bukan BPKP, jadi harus selalu dikaitkan dengan tujuan negara. Oleh karena itu hasil pemeriksaan itu juga bukan hanya sekedar untuk memeriksa kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan pelaksanaan daripada penggunaan anggaran itu, pengelolaan keuangan itu. Misalnya di forum yang terhormat ini masih banyak teman-teman mempertanyakan kenapa ketika BPK memberikan opini WTP terhadap satu kementerian dan lembaga atau di kedinasan di daerah-daerah di kabupaten di kota, itu baru saja dilakukan penilaian bahwa satu daerah diberikan nilai opini WTP, tetapi beberapa hari kemudian terjadi penangkapan terhadap bupati terhadap pejabat disitu, selalu jawabannya adalah "wah itu tidak ada kaitan". Nah kalau sekedar *output* tidak ada *outcome* tidak dikaitkan dengan *outcome* tujuan bernegara maka itu hal yang biasa

saja, tetapi ketika dikaitkan dengan *outcome* ini sejalan tidak dengan tujuan negara maka kita harus berani mengatakan bahwa memang pemeriksaan ini harusnya juga bisa menjamin berkurangnya penyimpangan-penyimpangan seperti itu.

Oleh karena itu saya memang mengusulkan untuk dilakukan bukan hanya sekedar pemeriksaan terhadap pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu bukan hanya sekedar opini yang diberikan atau solusi rekomendasi perbaikan kinerjanya atau kesimpulan tentang penyesuaian, tetapi juga dikaitkan dengan *outcome* tujuan bernegara. Nah itu yang saya ingin sampaikan. Nah barangkali itu dulu Pimpinan, kalau nanti ada hal-hal yang perlu saya jelaskan ulang dari pertanyaan Bapak Ibu yang terhormat, saya persilakan. Saya kembalikan waktunya pada Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Saya persilakan Prof. Hendrawan.

F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO) :

Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan yang saya hormati.

Pak Achmadi Noor Supit yang biasanya duduk di tempat yang saya duduki ini. Yang pertama saya bergembira karena Pak Supit menyinggung *learning organization*, BPK sebagai organisasi belajar, ya disini disebut organisasi yang belajar. Yang saya agak kurang jelas proses pengetahuan ... yang Bapak maksudkan ini apa, karena terlalu banyak intuisi nanti organisasi ini digerakkan tanpa basis logika dan rasionalitas yang jelas karena intuisi kan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dikaitkan dengan indeks persepsi korupsi Pak Supit kemudian laporan majalah tempo beberapa edisi, yang dihadapi oleh Indonesia adalah proses perencanaan yang menyimpang dari hulu sampai hilir, jadi hulunya sudah keliru, hilirnya keliru. Nah dalam konteks konstelasi organisasi seperti ini bila Pak Supit duduk sebagai Pimpinan BPK, apa yang atau terobosan apa yang harus dilakukan untuk mematahkan kaitan hulu hilir seperti ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Haerul Saleh.

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Terima kasih.

Pak Achmadi Noor Supit saya senang juga dengan apa yang dipaparkan tadi berkaitan dengan pemeriksaan yang menyeluruh termasuk pada sumber-sumber pembiayaan hutang dan sebagainya. Nah yang ingin saya tanyakan apakah yang Bapak maksudkan ini termasuk di dalamnya devisa negara. Cadangan devisa kita, kita tau selama ini dikelola sendiri dan mandiri oleh BI dan hampir tidak dijamah oleh lembaga manapun sehingga perlu saya ingin tau bagaimana dengan pendapat Pak Supit apakah memang penggunaan dana cadangan devisa negara ini juga termasuk di dalam pemeriksaan yang Bapak maksudkan. Saya kira itu Pak.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya yang berikut, Pak Sarmuji.

F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya sekaligus meneruskan atau menggarisbawahi apa yang disampaikan Profesor Hendrawan. Jadi *learning organization* itu kalau diteruskan ke proses penciptaan pengetahuan, itu ada dua jenis pengetahuan sebenarnya kata Nonaka dan Takeuchi: *Tacit Knowledge* dan *Explicit Knowledge*. *Tacit Knowledge* itu pengetahuan yang tidak dikatakan yang bisa dipelajari hanya dengan pelibatan, sementara *Explicit Knowledge* itu belajar dari buku dan sebagainya. Mungkin Pak Supit bisa memberi penjelasan pada kami kira-kira kalau nanti jadi anggota BPK, proses belajar di BPK *Tacit Knowledge* dan *Explicit Knowledge* itu barangkali seperti apa gambaran besarnya. Saya memperjelas sedikit apa yang disampaikan Prof, mungkin intuisi *knowledge* tadi mungkin bagian dari *Tacit Knowledge*.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Heri Gunawan.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Supit yang saya hormati.

Selamat malam Pak. Saya menarik sekali apa yang dikatakan Pak Supit kali ini mungkin dari beberapa kawan yang tadi mencoba mempresentasikan bahkan ke anggota yang *incumbent* pun tadi berbicara, ada hal yang menarik terkait dengan posisi dan peran strategis BPK yang Bapak singgung disini, yang berbicara tentang yang dikaitkan dengan tujuan bernegara. Satu catatan kecil tadi Pak sempat kami sampaikan, hasil pemeriksaan 2017 itu ada 476.614 temuan dari BPK. Sementara untuk IHPS tahun 2018 semester kedua itu meningkat menjadi 512.112, yang menarik didalamnya ada temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti, temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti untuk tahun 2017 itu ada 4040. Sementara 2018 itu ada menjadi 5312 alias ada 1252 temuan baru ekuivalen 30%, apa hubungannya dikaitkan dengan tujuan bernegara. Tadi sempat saya tanyakan ke *incumbent* itu permasalahannya karena kementeriannya berubah, atau kementeriannya yang di-*split*. Contoh kasus tadi ada Kemendikbud menjadi ada Kemenristekdikti seperti itu sehingga mereka diantaranya saling lempar tanggung jawab. Sementara disini berbicara ada kerugian potensi 16,91 Triliun. Dikaitkan dengan tujuan bernegara kalau Pak Supit sampaikan disini dengan dasar ataupun latar belakang undang-undang baik dari Undang-Undang tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan, Pemeriksaan BPK, dan lain sebagainya, tentunya keseluruhan ini tidak akan terlepas dari rencana strategis BPK. Rencana strategis BPK tentunya tidak akan terlepas dari rencana strategis dari Pemerintah itu sendiri Pak Supit, mereka pasti akan mensinergikan itu. Saya ingin minta pandangan dari Pak Supit terkait dengan langkah konkret berkaitan dengan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti ini karena tadi disampaikan sesuai dengan tujuan bernegara kira-kira langkah konkret apa Pak Supit yang akan dilakukan padahal kita sudah memiliki kurang lebih disini ada empat undang-undang yang dibekali atau membekali BPK.

Kurang lebih demikian, terima kasih Pak Supit.

KETUA RAPAT:

Pak Hatari.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Supit, *paper*-nya bagus sekali, apresiasi. Saya hanya satu Pak Supit, di kesimpulan poin yang keenam nanti Bapak buka disitu, kesimpulan poin enam sudah Pak? Strategi pemeriksaan yang menjamin bahwa opini WTP berbanding lurus dengan berkurangnya tingkat korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Kenyataan menunjukkan banyak kementerian yang mendapat predikat WTP tapi pada gilirannya pakai rompi. Ya mudah-mudahan nanti Bapak terpilih ini bisa menjadi satu konsentrasi penuh untuk bisa mengembalikan marwah daripada

lembaga yang independen ini Pak. Kemudian daftar pustaka tadi memang, tapi saya rasa nanti *ndak* terkejar, kalau daftar pustaka itu Bapak juga mencantumkan IHPS semester I 2018 lebih gagah lagi, tapi saya rasa dari segi waktu mungkin tidak sempat tapi *paper* ini sekali lagi saya apresiasi cukup baik.

Makasih Pimpinan, tidak sampai satu menit.

KETUA RAPAT:

Mantap. Bu Tutik.

F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M., M.Kes.):

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

Bapak Achmadi Noor Supit yang saya hormati, sebagai calon anggota BPK yang pernah duduk di Komisi XI DPR RI.

Saya ingin menanyakan ini yang ada korelasinya dengan pengalaman Bapak di Komisi XI dengan BPK Pak. Seandainya nanti Bapak terpilih menjadi anggota BPK, langkah-langkah kebijakan apa yang akan diambil dalam menyelaraskan target pertumbuhan ekonomi dan target pembangunan sebagai *outcome* baik di dalam pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan lainnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Udah ya Bu ya?
Ibu Indah.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Supit yang kami hormati.

Pertama-tama saya mengapresiasi *paper* yang Bapak pakai sebagai presentasi, kami merasa dihargai sekali jadi berapa tadi hari ini, enam ya? Bukan hanya tebal, semuanya ini kontennya terutama senyumnya yang tulis ini di depan maupun ini. Iya banyak sekali ini nanti ini akan saya simpan Pak, saya simpan untuk sebagai baca lebih detail di rumah kemudian sekaligus nanti saya akan *remind* kalau Bapak terpilih dan tidak memenuhi apa yang didalam sini. Dari ini agak sedikit beda saya langsung saja baca ke penutup di poin ketiga yang ada di kami, pentingnya audit, tadi Bapak sudah memang *concern* terhadap sumber-sumber perencanaan

untuk tentang penerimaan negara, kalau di kami pentingnya audit atas penerimaan negara dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan meningkatnya investasi yang menciptakan lapangan kerja. Itu memang menjadi harapan dan tujuan kita bersama dalam bernegara, lapangan kerja kesejahteraan dan seterusnya. Nah dikaitkan tadi dengan *tagline* Bapak tadi di awal yang ... dari Helen Keller bahwa "*alone we can do so little, together we can do so much*" kira-kira kalau Pak Supit terpilih nanti apa yang Bapak lakukan untuk bisa mewujudkan khususnya poin tiga itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Pak Andreas.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Ya saya ingin penjelasan lebih lanjut mengenai sinergi positif dan menciptakan nilai tambah dengan DPR melalui rapat konsultasi selama proses pemeriksaan berlangsung yakni dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan. Di satu sisi BPK harus independen karena disebutkan itu dalam proses pemeriksaan, jadi mungkin itu yang perlu tindakan lebih lanjut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang berikut, Ibu Eviana.

F-PPP (Dra. EVIANA, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Supit yang saya hormati.

Saya juga apresiasi, pertama apresiasi Bapak berani maju. Kita pernah konsultasi dengan BPK, sekiranya nanti Bapak lolos ditempatkan mengaudit BUMN. Begitu banyak BUMN sebenarnya bermasalah karena dalam menjalankan bisnisnya itu tidak berdasarkan *business plan* yang mereka buat. Nah apa tanggapan Pak Supit tentang itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Berikut yang terakhir, Pak Erik.

F-P. HANURA (ERIK ADTRADA RITONGA):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Supit yang terhormat.

Dari gambar Bapak meyakinkan sekali bahwasanya Bapak ini mungkin bakal terpilih menjadi anggota BPK, amin Pak Supit. Yang ingin saya tanyakan adalah tujuan Bapak menjadi anggota BPK tentu untuk memperbaiki kinerja BPK yang kurang baik selama ini sehingga Bapak ingin mencalonkan diri menjadi anggota BPK. Yang tidak disebutkan dalam makalah Bapak yang baik ini yang bagus ini adalah bagaimana apabila nantinya Bapak terpilih menjadi anggota BPK pencegahan-pencegahan yang selama ini terus berulang, langkah apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki SDM yang ada sekarang ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Masih ada satu lagi ya Ibu Ana.

F-P. NASDEM (ANARULITA MUCHTAR):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak Supit, yang di DPR RI sudah berapa periode jadi saya rasa sangat mengenal itu lembaga BPK. Jadi satu aja pertanyaan saya, kalau dari seluruh yang Bapak paparkan tadi artinya dia sangat bersangkutan paut dengan undang-undang yang harus dituruti dari BPK jadi kebetulan kita juga ingin membahas revisi Undang-Undang BPK yang baru, batas mana urgensinya Pak apa namanya mendesaknya RUU BPK yang baru yang akan kita bahas untuk mungkin periode berikutnya terkait dengan program-program yang Bapak tawarkan tadi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, dari ini sudah jadi Pak Supit masih ada waktu 18 menit. Silakan Pak Supit.

CALON ANGGOTA BPK RI (Ir. H. ACHMADI NOOR SUPIT):

Terima kasih Pimpinan.

Ini pertanyaannya luar biasa dan banyak sekali. Soalnya biasanya kita yang nanya begitu, sekarang ditanya sama teman. Baik Pak Prof. Hendrawan, saya memang berpikirnya begini, saya berpikirnya tentu pemahaman saya ini kan dari luar BPK, saya belum menjadi anggota BPK. Oleh karena itu posisi saya adalah posisi yang melihat BPK dari luar, bukan melihat posisi BPK dari dalam walaupun saya sedapat mungkin nanti melakukan komunikasi dengan anggota BPK dan saya ingin tau apa yang terjadi di BPK. Tapi tetap posisi saya, pemahaman saya, persepsi saya tentang BPK adalah masih sebagai dalam kapasitas calon anggota BPK. Oleh karena itu ketika saya membuat *paper* ini adalah saya mencoba bagaimana sih itu BPK seharusnya sesuai yang diamanahkan oleh konstitusi. Oleh karena itu saya penekanan saya pada saat melihat itu dari luar adalah, ada hal-hal yang membuat saya selalu bertanya kenapa lembaga tinggi negara setingkat BPK yang konstitusi jelas memberi amanah kepada dia untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu kemudian tidak terlalu, mohon maaf, ini sudah bagus tetapi belum terlalu bagus ketika dikaitkan dengan tujuan kita bernegara begitu karena selama saya bertugas di DPR misalnya, teman-teman sama dengan saya di Komisi XI apalagi, sering mempersoalkan kita mengeluarkan uang sekian ribu triliun tetapi kok kemiskinan, kesejahteraan, pendidikan, masih tidak bisa beranjak sesuai dengan biaya yang kita keluarkan begitu. Nah saya ingin mengambil posisi ketika harus jadi BPK seperti apa, kalau posisi sebagai sama dengan Bapak Ibu sekalian, saya melihatnya kok banyak hal misalnya di kementerian dan lembaga itu yang perannya gitu, yang tugasnya itu tidak ada kaitan langsung dengan tujuan bernegara kita sehingga 2000 Triliun sekian itu ya seperti membuang garam di laut, *ga* ada peningkatan yang signifikan, mengurangi kemiskinan, menyelesaikan masalah pendidikan dan seterusnya. Nah ketika kemudian saya mencoba melihat kondisi terkini posisi sekarang di BPK, saya mencoba melihat membaca buku sedikit gitu ya kemudian bertanya sama teman-teman yang ada di BPK, kenapa BPK tidak sampai kepada itu melalui tugasnya untuk melakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan keuangan, melakukan pemeriksaan untuk tujuan tertentu, itu tidak memberikan *support* banyak selain hanya temuan, penyimpangan dari pelaksanaan pengelolaan itu. Nah tidak juga memberikan penilaian ada keberanian secara politik untuk memberikan penilaian bahwa ini kementerian ini misalnya tidak penting ini hanya membuang-buang uang, ini tidak ada kaitan langsung dengan tujuan bernegara kita, banyak yang *overlapping* semuanya, bahkan dari teman-teman yang dari BPK juga menyampaikan bahwa sebetulnya kalau kita mau lihat banyak dari departemen-departemen yang tupoksinya tumpang tindih itu *toh* juga *ga* ada kaitannya dengan tujuan bernegara itu, itu posisinya Pak profesor.

Oleh karena itu bagi saya urusan kemudian karena saya melihatnya dari luar, kita memperbaiki kinerja daripada BPK, itu kan ini kan sudah benar kita bisa yang

penting tujuannya seperti apa kemudian organisasi seperti apa yang harus kita siapkan dalam rangka menuju itu. Oleh karena ini, ini masih dalam proses pembelajaran di BPK kita memahami karena semua visi dan persepsinya bisa tidak sama, ini kan harus kita menyamakan. Nah oleh karena itu bahwa disitu ada apa kita sampaikan BPK sebagai *learning organization* ini karena dalam rangka menyesuaikan itu kita akan meng-*hire* semua tenaga yang kita butuhkan, auditor kah itu, apa saja yang dibutuhkan untuk BPK itu ada nanti kita sesuaikan dengan rencana kerja daripada lima tahun yang akan datang, ini kan lima tahunan ini, karena ini adalah periode terakhir dari kepemimpinan yang ketuanya diganti nanti kita merencanakan lima tahun lagi kedepan seperti apa. Nah sistem semuanya kita akan sesuaikan dengan itu, tidak mungkin tidak semuanya harus dilakukan sama, kan tergantung kita akan melakukan apa lima tahun kedepan BPK ini, nah itu yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kalau ditanyakan kemudian bagaimana sih proses pengetahuan intuitif dan seterusnya. Saya beranggapan saya katakan makanya tadi disampaikan pertanyaan teman-teman yang lain begitu tentang kaitannya bagaimana rencana strategis BPK, bagaimana temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti begitu kan, bagaimana Pak Sarmuji tadi mempertanyakan tentang teori apa ini *continuous improvement* dan seterusnya, strategi bagaimana untuk menselaraskan antara target itu dan seterusnya ini saya berpikirnya begini lagi. Oleh karena itu saya melihatnya ini adalah *problem* nya saya akan mencoba masuk disitu bersama dengan teman-teman kita mengembalikan kembali menyamakan dulu visi dan persepsi kita tentang apa yang harus, apakah hanya sekedar selesai di *output*, ataukah harus bisa juga sampai di *outcome*.

Satu contoh kecil Pak prof, ketika di daerah, ketika pemberian ada yang protes, saya baru saja diceritakan oleh teman, ada gubernur yang protes, kenapa? Kami WTP lima tahun berturut-turut, sudah lima tahun berturut-turut mendapat WTP tetapi kenapa pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN itu memberi penilaian rendah kepada kami. Ketika itu ditanya kenapa? Ini kan mempermalukan kami di daerah. Nah dikatakan WTP itu diberikan misalnya, contoh ini contoh mohon maaf ini saya memakan waktu sedikit, contoh orang mendapatkan beasiswa diberikan uang 1 Juta katakan seperti itu, ada karena ini beasiswa dalam rangka pendidikan, 1 Juta ada yang menggunakan untuk membeli tas untuk kebutuhan pendidikan juga, kemudian ada yang menggunakan untuk membeli dua buku padahal pelajarannya ada empat, dia hanya sanggup 1 Juta itu dua buku, tapi ada yang membeli empat buku tapi fotokopian. Karena ini kaitannya ketika diperiksa, yang membeli tas itu juga WTP karena sesuai dengan tujuan untuk belajar, yang membeli dua buku juga WTP tidak ada salahnya karena sesuai dengan kebutuhan pendidikan, tetapi dua orang ini tidak lulus tidak sampai ke tujuan negara dia tidak lulus karena dia punya pengetahuan dua yakni buku, yang ini membeli empat kertas, dia lulus, karena *goal* nya adalah untuk lulus bukan untuk sekedar memanfaatkan uang beasiswa disesuaikan dengan pendidikan. Nah sampai disini saja itulah WTP tidak menjamin karena menilainya hanya sekedar *output* kesesuaian dengan kebutuhan tetapi tidak disesuaikan dengan tujuan akhirnya yaitu untuk lulus. Ini

adalah *problem* kita, kalau pemeriksaan hanya sekedar sampai disitu makanya prof, makanya teman-teman sekalian yang kaitan pertanyaan dengan BPK ini saya mau menyamakan sama teman-teman nanti mencoba menyamakan persepsi lagi apa yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan negara itu, teknik seperti apa itu seperti apa, ini kan ilmunya banyak kita bisa meng-*hire* siapa saja, kita bisa meng-*hire* dalam dan luar negeri untuk memberikan ilmu tentang audit, tentang memeriksa. Yang penting pemeriksaan itu harus sampai kaitannya dengan tujuan bernegara ketika Pak Hatari bilang banyak sekali kan yang seperti itu di daerah, kementerian dan lembaga WTP tetapi kemudian dikasih jaket *orange* begitu kan, yang begini-begini karena itu dia hanya sampai kepada *output* tidak berpikir *outcome* padahal semua lembaga tinggi negara apalagi lembaga tinggi negara, semua badan apapun tujuan akhirnya dia harus sesuai dengan tujuan bernegara kita, kalau *engga* buang-buang uang buang-buang mubazir, itulah pengelolaan pemeriksaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, saya fokusnya disitu mengarahkannya kesitu. Oleh karena itu saya ingin mengajak kesana tapi mohon maaf saya belum dalam posisi BPK, belum dalam posisi anggota BPK, jadi melihat dari luar, inilah misinya, nah kalau teman-teman katakan kira-kira saya bisa *engga* melakukan itu, ya tentu kita ya kita akan berdiskusi dengan anggota yang lain tentunya, tetapi pemahaman saya ini saya mencoba mudah-mudahan bisa sama dengan teman-teman. Saya yakin selama komitmen berbangsa dan bernegara itu bisa ada masih di dada para anggota BPK saya kira dengan seluruh aparat BPK saya kira mudah-mudahan kalau niatnya baik saya yakin

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Pak Supit izin, jangan dibatasi. Sebagai pribadi sebentar.

KETUA RAPAT:

Pak Hatari, ini waktunya Pak Supit tinggal empat menit, jadi kita harus *fair* sama yang lain juga.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Ini catatan kritis.

KETUA RAPAT:

Ya nanti, dia selesaikan dulu catatan kritis terakhir. Ayo Pak

CALON ANGGOTA BPK RI (Ir. H. ACHMADI NOOR SUPIT):

Saya mohon maaf tidak spesifik harus menjawab satu per satu, tetapi saya menangkap saja semua apa namanya keinginan, nah satu lagi yang penting saya kira Pak itu yang tadi ditanyakan kaitannya dengan DPR ya, itulah kenapa kemudian saya menawarkan ada konsultasi antara DPR dengan BPK karena banyak sekali, BPK itu kan tidak berpolitik, tetapi dia bisa atas dasar temuan-temuannya itu untuk memberikan masukan, untuk memberikan *input* kepada DPR, kan DPR yang menggunakan salah satu yang menggunakan secara politik hasil pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan keuangan itu harus dilaporkan kepada DPR kan kepada paripurna DPR. Nah laporan itu kan hanya sampai kepada *output* tidak sampai *outcome*, ada hal-hal yang ini menjadi temuan BPK yang perlu dikonsultasikan DPR sebagai lembaga politik yang bisa menindaklanjuti secara politis untuk memberikan usulan perbaikan terhadap Pemerintah.

Oleh karena itu perlu diciptakan, perlu disiapkan waktu konsultatif dengan ini, apakah dengan, kalau komisi tentu kan selama ini yang menjadi mitra kerja dari komisi adalah kesekjenan, kesekjenan bukan anggota BPK kan begitu, dengan BAKN bukan anggota BPK, tapi alangkah bagusnya karena memang forumnya hanya konsultatif antara lembaga DPR dengan lembaga BPK maka itu harus ada begitu rencana konsultatif BPK dengan DPR yang tentunya intinya adalah nanti yang hadir intinya adalah BAKN itu dan Komisi XI tentu sebagai yang menindaklanjuti secara politik temuan-temuan yang harus diitukan karena BPK untuk itu langsung kan tidak seperti itu penugasannya. Itulah yang saya inginkan, soal itu adalah dalam tahapan proses dan seterusnya itu nanti mekanismenya yang diatur tetapi intinya adalah perlu ada rapat konsultatif berkala antara DPR dengan BPK.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saya kasih satu menit catatan kritis.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Tidak sampai. Hitung lihat jam tidak sampai satu menit.

Yang pertama Pak Supit sebagai pribadi saya merasa puas bangga dengan penjelasan Pak Supit dan sebagai orang yang puluhan tahun diperiksa oleh BPK mudah-mudahan Pak Supit nanti terpilih. Bukan menjadi rahasia lagi, BPK terlalu gampang memberikan predikat pada tingkat Pemerintahan, ini harus menjadi catatan kalau Bapak terpilih. Pemberian satu predikat WTP ada harga tertentu, ini bukan *hoax* Pak, wakil bupati, kepala keuangan semua menuturkan ini sebelum *review* bicara dulu kalau WTP bayar berapa, jadi ini soal WTP soal predikat BPK ini

sudah menjadi komoditas daripada BPK bukan rahasia lagi. Jadi mudah-mudahan Bapak terpilih ini harus menjadi *concern* buat Bapak terutama di daerah kabupaten/kota terlalu gampang, tata kelolanya kacau balau tiba-tiba WTP wah ini kita jadi bingung juga.

KETUA RAPAT:

Sudah satu menit Pak.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Nah karena tadi WTP adalah pernyataan profesional yang tidak bisa dirundingkan pakai alasan ini jadi biar kacau balau juga tidak bisa

KETUA RAPAT:

Baik. Memang kalau omong enak ya maunya terus.

Baik Pak Supit terima kasih atas pemaparannya semoga ini bermanfaat buat teman-teman untuk mengambil keputusan, terima kasih Pak. Rapat saya skors.

(RAPAT DISKORS)

Saya cabut dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum

(SKORS DICABUT)

Saudara Daniel Lumban Tobing, calon anggota BPK, terima kasih sudah menghadiri *fit and proper*, waktu anda 45 menit, 15 menit anda memberikan pemaparan, 15 menit anggota menanyakan, dan 15 menit anda menjawab. Kami persilakan saudara Daniel sekarang jam 20.50. Silakan.

CALON ANGGOTA BPK RI (Ir. DANIEL LUMBAN TOBING):

Terima kasih Pimpinan.

Selamat malam,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swasti Astu.

Bapak-Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota dewan Komisi XI yang terhormat.

Pertama-tama terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama izinkan saya memperkenalkan diri hanya satu menit, mungkin ada satu dua orang dari Bapak Ibu yang masih belum kenal saya. Nama saya Daniel Lumban Tobing, lahir di Surabaya tahun 1967, adapun SD-SMP-SMA saya di Jakarta, tahun '86 saya lulus SMA, '87 saya dapat beasiswa saya kuliah di Jepang, dan saya lulus tahun '93 dari Kyoto University. Setelah itu saya kembali ke Indonesia, saya bekerja di salah satu PMA yang cukup besar *electronic manufacturing* dimana tenaga kerja sangat besar dan pada saat itu penjualannya 1 Miliar US Dollar dan disitulah saya salah satu juga bertanggung jawab di dalam audit keuangan dan juga audit *quality* di dalam *product-product* daripada perusahaan tersebut. Dari tahun 2009 hingga sampai saat ini, saya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, saya satu tahun di Komisi IV, tujuh tahun di Komisi VI, dan kurang lebih dua tahun di Komisi IX, dan dari 2014-2019 saya juga merupakan Badan Anggaran daripada Badan Anggaran DPR RI.

Baik, adapun pada saat ini izinkan saya untuk berbicara mengenai kebijaksanaan pemeriksaan BPK berbasis program strategis Pemerintah. *Next*, jadi latar belakangnya pada saat ini di BPK pemeriksaan kinerja sangat minim dibandingkan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang kedua, persepsi masyarakat bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah belum akuntabel dan transparan. Dan yang ketiga, hasil pemeriksaan kinerja BPK masih parsial dan tidak substantif sehingga sampai saat ini belum dapat dibuatnya hasil pemeriksaan kinerja Pemerintah secara komprehensif, jadi saya berharap melalui forum ini nanti kedepannya BPK dapat lebih menekankan pemeriksaan kinerja berbasis pencapaian program strategis Pemerintah. Selanjutnya *Next*.

Bapak Ibu saya pikir Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat lebih familiar bahwa sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bahwa BPK dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang dimaksud itu:

1. Mengenai pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan dimana hasilnya merupakan opini.
2. Pemeriksaan kinerja, pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas dan biasanya hasilnya ini merupakan kesimpulan dan rekomendasi.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, dan hasilnya merupakan kesimpulan.

Selanjutnya, adapun untuk mengetahui lebih jelas perbandingan antara tiga jenis pemeriksaan dilakukan oleh BPK dalam tujuh tahun yang saya ambil datanya ini kalau kita lihat tahun 2010 itu pemeriksaan kinerja ini jauh dibandingkan dengan pemeriksaan keuangan dan juga PDTT, dan 2011 malah PDTT sangat besar sekali jumlah pencapaian laporannya dan sampai 2016 dimana pemeriksaan keuangan sudah rata-rata di 649-651 2017, tetapi pemeriksaan kinerja angkanya tidak begitu besar, malah dibandingkan 2016 pemeriksaan kinerja ini agak sedikit penurunan. Padahal pemeriksaan kinerja ini sangat penting karena pemeriksaan ini dapat menilai arah daripada program Pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif sehingga kita akan fokuskan nanti kedepannya di dalam penugasan BPK ini untuk pemeriksaan kinerja.

Selanjutnya, untuk menjelaskan lebih lanjut, kita lihat posisi DPR, Pemerintah, dan BPK kalau kita menggunakan *agency theory*, hubungan keagenan atau *agency relationship* adalah kontrak dimana satu pihak atau lebih yang disebut *principal* menggunakan pihak lain yang disebut *agent* untuk melaksanakan pekerjaan atas nama *principal* yang melibatkan pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan kepada *agent*. Dalam hubungan keagenan tersebut dimungkinkan adanya kondisi dimana *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* sehingga *principal* harus melakukan monitoring atas aktivitas *agent*. Jadi kalau digambarkan segitiga ini yang disebut *principal* itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang disebut *agent* adalah Pemerintah, dan BPK selaku monitoring atau audit. Jadi disini kita bisa melihat dalam segitiga saling berhubungan ini bahwa Pemerintah harus mempertanggungjawabkan dalam setiap aktivitasnya itu kepada DPR. Dan sebaliknya DPR meminta BPK untuk mengaudit atau memonitoring daripada dalam pelaksanaan-pelaksanaan Pemerintah tersebut. Jadi BPK harus benar-benar bisa melihat daripada pernyataan-pernyataan Pemerintah itu benar atau tidak. Disinilah yang saya sampaikan bahwa pengalaman-pengalaman saya pribadi yang selama ini baik di korporasi dan juga selama 10 tahun di DPR khususnya di Badan Anggaran, dimana khususnya di Badan Anggaran ini kita bisa mengetahui dan mempelajari bagaimana postur anggaran, bagaimana tata kelola keuangan negara, bagaimana proses persetujuan anggaran tersebut dapat kita pahami. Jadi dari sinilah kita juga melihat sebagaimana pentingnya BPK itu harus terus berkomunikasi dengan DPR khususnya dengan Komisi XI. Jadi wajib hukumnya BPK terus melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan Komisi XI di masa yang akan datang.

Selanjutnya, ada beberapa hambatan yang kita lihat pada saat ini, yang pertama yaitu kelemahan kapasitas SDM dalam merumuskan program Pemerintah pusat dan daerah. Yang kita pahami tadi seperti saya sampaikan bahwa *output* dari audit kinerja ini yaitu kesimpulan dan rekomendasi, jadi pada saat penyusunan rekomendasi ini kapasitas daripada SDM di BPK memang harus kita tingkatkan. Yang kedua, upaya mengharmonisasikan RPJPM dengan RPJPD, RPJPM dan RPJMD dan Renstra antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah. Yang

ketiga, menyusun kriteria yang akurat sebagai dasar membuat kesimpulan dan rekomendasi yang tepat dan terpercaya. *Next.*

Adapun solusi dan strategi yang saya tawarkan yaitu koordinasi dan sinergitas sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, metodologi dan pendekatan pemeriksaan. Sehingga dengan meningkatkan kemampuan SDM dan sarana prasarana serta metodologi ini dapat dihasilkan laporan hasil pemeriksaan LHP yang berkualitas dan berartikulasi dengan kebutuhan pemilik kepentingan utama, dalam arti melalui LHP ini kita bisa menilai sejauh mana Pemerintah telah mencapai sasaran-sasaran atau kinerja dalam program-program Renstra Pemerintah.

Kesimpulannya, yang pertama BPK belum menyusun kebijakan pemeriksaan kinerja atas pencapaian program strategis Pemerintah untuk memberikan pendapat tentang sejauh mana pencapaian visi dan misi Pemerintah pusat selaras dengan Pemerintah daerah. Yang kedua, Pemerintah belum memiliki kapasitas untuk membangun suatu Renstra secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan kerangka yang baku dan memadai.

Dan terakhir, saran-saran. Yang pertama, pemetaan kondisi Pemerintah pusat dan seluruh Pemerintah daerah untuk menghasilkan rencana pemeriksaan yang berbasis resiko. Yang kedua, rencana pemeriksaan berbasis resiko dalam rencana kerja Pemerintah pusat, pemeriksaan pusat dan perwakilan. Yang ketiga, perumusan kebijakan pemeriksaan kinerja dan rencana implementasi strategi pemeriksaan. Dan yang keempat, pemberian pendapat atau rekomendasi atas peningkatan pelayanan dan kinerja Pemerintah berbasis program. Dan memang kalau saran-saran ini bisa dijalankan saya berharap kedepannya BPK bisa lebih baik dan bertenaga, dapat memberikan saran-saran perbaikan untuk meningkatkan khususnya pertumbuhan ekonomi yang lebih dari saat ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Berikut kami persilakan kepada saudara Heri Gunawan.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Daniel yang saya hormati.

Saya hanya ingin coba membedah Pak Daniel, BPK ini diberikan amanat undang-undang dengan kurang lebihnya ada empat undang-undang sementara di satu sisi menurut laporan BPK, ada beberapa temuan yang tidak dapat

ditindaklanjuti dimana temuan-temuan itu untuk tahun 2017 ke 2018 itu naik temuannya sampai dengan 30%. Yang ingin saya coba tanyakan jikalau Pak Daniel terpilih menjadi anggota BPK, langkah-langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan? Kalau kita bertanya kepada *incumbent* BPK, rata-rata mereka bercerita ada kementerian yang terpecah seperti Diknas menjadi ada di satu sisi, Diknas ada di satu sisi Dikti seperti itu, akhirnya saling lempar-lempar seperti itu. Sementara di satu sisi BPK memiliki kekuatan dengan adanya empat undang-undang itu. Hal berikut kalau seandainya Pak Daniel terpilih, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan pada saat memperoleh atau menemukan sebuah temuan yang terus berulang, terkadang ada beberapa dari entitas kita seperti kementerian dan lembaga memiliki temuan yang nyaris sama setiap tahunnya. Hal yang ketiga yang ingin saya coba tanyakan, langkah-langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan untuk membina atau mensinergikan antara BPK dengan DPR.

Demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang berikut, Prof. Hendrawan.

F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan yang saya hormati.

Pak Daniel Lumban Tobing, yang pertama saya ingin memberikan apresiasi karena Pak Daniel menggunakan teori yang sangat sulit, untuk mereka yang belajar teori ekonomi tau, ini salah satu teori yang paling sulit, *the agency theory* Michael Jensen & William Meckling. Pak Daniel, di halaman ini tolong saya tidak ada halaman nya, di segitiga tolong *slide* nya mungkin. DPR sebagai *principal* mendelegasikan kewenangan kepada *agent* kemudian *agent* dimonitor oleh BPK sebagai lembaga audit. Disini dikatakan bahwa *principal* harus melakukan monitoring atas aktivitas *agent* dan oleh karena itu menimbulkan biaya atau *agency cost*. Nah tetapi pada saat yang sama sebenarnya dalam kenyataan Pak Daniel, *agent* juga mempengaruhi penilaian *principal* terhadap *agent* yang sering disebut *influence cost*, jadi *agent* berusaha mempengaruhi persepsi yang dimiliki oleh *principal* agar penilaian *principal* sesuai dengan keinginan *agent*. Jadi teorinya seperti ini tetapi dalam secara faktual jauh lebih kompleks. Itu sebabnya belakangan *agency theory* dilawan oleh teori baru yang dikembangkan oleh Pak ... namanya *stewardship theory*. Jadi apa yang disampaikan Pak Daniel ini satu langkah lebih maju tetapi nanti dalam praktek mungkin Pak Daniel membutuhkan ... teoritis yang lain untuk mengembangkan BPK. Itu yang pertama.

Terus yang kedua, Pak Daniel disini belum secara eksplisit menyebutkan masalah utama apa yang membuat BPK belum muncul menjadi lembaga yang kredibel, ini belum disebutkan secara eksplisit ya. Kalau soal SDM yang tidak memadai dan seterusnya ini saya kira terlalu umum (*generic*) tolong Pak Daniel lebih berani karena Komisi XI membutuhkan figur-figur yang berani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Ir. MARWAN CIK ASAN):

Terima kasih Prof. Hendrawan.
Silakan Bu Tuti.

F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M., M.Kes.):

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

Pak Daniel yang saya hormati.

Tadi Bapak menceritakan bahwa Bapak pernah bekerja di perusahaan Jepang ya Pak ya, kalau orang yang berpengalaman bekerja di perusahaan Jepang itu saya yakin Pak kejujuran dan etos kerjanya tidak bisa diragukan lagi. Oke Pak, tadi Bapak ingin menekankan bahwa pemeriksaan kinerja yang berbasis pencapaian program strategis Pemerintah ya Pak ya, itu poin penting Pak. Dengan banyak kelemahan tentang pemeriksaan dengan metode *sampling* Pak yaitu audit yang menerapkan konsep materialitas, nah bagaimana nanti langkah-langkah Bapak untuk mencapai tujuan Bapak itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Tuti.
Silakan Pak Haerul Saleh.

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Terima kasih.

Singkat Pak, ini terkait dengan yang ada di paparan ini, sinergitas dengan berbagai institusi yang dipandang oleh Pak Prof sangat diperlukan, nah khususnya terkait dengan peran KSP, gimana hubungannya ini Pak, maksudnya KSP ini berperan sebagai apa kenapa mesti sinergi dengan BPK, sementara undang-undang kita ini udah jelas sinergitasnya BPK itu terhadap lembaga-lembaga institusi yang merupakan amanah undang-undang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Silakan Pak Andreas.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Singkat saja, saya ingin dijelaskan lebih lanjut mengenai kesimpulan nomor dua, Pemerintah belum memiliki kapasitas untuk membangun satu Renstra secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan kerangka yang baku dan memadai. Nah ini hubungannya dengan BPK ini apa, apakah kemudian nanti BPK akan lebih menekankan ... kesimpulan ini tolong dikaitkan dengan misi daripada BPK sendiri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Andreas.
Silakan Pak Purnamasidi.

F-PG (H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI):

Terima kasih Pimpinan.

Singkat saja, di latar belakang ini ada *statement* hasil pemeriksaan kinerja BPK masih parsial dan tidak substantif. Saya hanya ingin tau dari Pak Daniel gimana skenarionya agar hasil pemeriksaan kinerja BPK ini tidak parsial lagi, saya ingin tau skenarionya seperti apa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Silakan Bu Eviana.

F-PPP (Dra. EVIANA, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Daniel yang saya hormati.

Saya ingin mendapat penjelasan dari Bapak, dengan latar belakang pendidikannya saya lihat teknik ya? Sementara nanti Bapak akan bekerja sebagai

auditor negara, akan mengaudit salah satunya aspek kepatuhan yang tentu saja harus memerlukan pemahaman yang berlatarbelakang hukum. Bagaimana Bapak meyakinkan saya, Bapak paham juga nanti tentang itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Silakan Pak Agun.

F-PG (Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.):

Pak Daniel, judul Bapak ini menarik. Kebijakan pemeriksaan BPK berbasis program strategis Pemerintah. Di kesimpulannya menyatakan BPK sampai dengan saat ini belum menyusun kebijakan pemeriksaan kinerja dan seterusnya. Yang Bapak kehendaki, yang Bapak inginkan itu yang seperti apa. Saya hanya ingin detail dari apa yang Bapak buat dalam kertas kerja ini. Pak Daniel, pertanyaan saya yang kedua, sesungguhnya kedepan ini, ini *ga* bisa lagi hal-hal yang sifatnya itu biasa-biasa saja, harus ada sebuah gerakan perubahan yang radikal menurut saya, memang harus radikal Pak kedepan, harus radikal. Saya ingin menyampaikan satu hal, di sektor bisnis di sektor ekonomi itu terjadi perubahan-perubahan yang begitu pesat, cepat, dengan sering kita bicara tentang *distruption technology* dan sebagainya, 4.0 dan sebagainya itu terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Apa yang ada dalam benak pikiran Pak Daniel terkait dengan tugas dan kewenangan BPK yang menjalankan tugas auditor ya, yang melakukan fungsi pengawasan dan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara ini, dalam benak pikiran Bapak tugas-tugas audit itu, apa yang sudah ada dalam bayangan Bapak hari ini dan lima tahun kedepan bahwa apa yang akan menjadi objek pengawasan kita itu terjadi sebuah lompatan yang luar biasa, lompat gitu jadi *ndak* bisa lagi mengaudit itu begini Pak, angka itu dilihat pakai mata gitu, ini udah lewat Pak. Kita bisa lihat perkembangan teknologi hari ini, orang bekerja nanti Pak tidak perlu lagi di kantor, bikin KTP tidak lagi berhubungan dengan petugas kelurahan, bikin SIM tidak perlu lagi berurusan sama polisi, kena tilang tidak perlu lagi berhadapan dengan pengadilan, hari ini sudah terjadi Pak.

Intinya, apa yang ada dalam bayangan Bapak tentang tugas-tugas auditor kedepan yang harus diantisipasi oleh BPK menghadapi pelayanan publik yang sudah akan seperti ini. Jadi kalau auditnya masih itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Pak Nizar.

F-P. GERINDRA (H. MOH. NIZAR ZAHRO):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Daniel yang sangat saya hormati.

Ada beberapa tulisan di makalah Bapak terutama di halaman empat bahwa BPK berdiri itu sejak tahun 1946, BPK berkiprah sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun sampai dengan sekarang BPK belum dapat memberikan pendapat tentang bagaimana hubungan visi dan misi antar Pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Saya minta penjelasan secara detail maksudnya apa sejak 1996 tidak bisa memberikan pendapat itu dalam hal apa karena kita tau banyak dana-dana dari Pemerintah pusat diberikan kepada Pemerintah kabupaten dan Pemerintah provinsi baik itu dana bagi hasil, dana desa, dana ..., dana alokasi khusus ... dan lain sebagainya. Tolong jelaskan secara detail.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Yang terakhir silakan Ibu Indah.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Daniel, saya langsung saran yang poin empat pemberian pendapat atau rekomendasi atas peningkatan pelayanan dan kinerja Pemerintah berbasis program dikaitkan dengan *roadmap* visi misi BPK dalam rencana strategis jangka panjang BPK untuk area perspektif pemangku kepentingan di 2016 sampai dengan 2020 fokusnya pada usaha untuk peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dan kemudian untuk 2020 fokusnya pasca 2020 fokusnya pada pemanfaatan rekomendasi BPK oleh para pemangku kepentingan. Penindaklanjutan tindak lanjut itu bagi kandidat yang sebelumnya disebut sebagai mahkota pemeriksaan ya. Menurut Pak Daniel calon anggota BPK, bagaimana atas pencapaian visi BPK di 2016 dan 2020 dan apakah Bapak sepakat dengan arah BPK pasca 2020.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Terakhir, Pak Achmad Hatari, Dr. Achmad Hatari.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Daniel, sependapat Pak di latar belakang ini dicantumkan hasil pemeriksaan kinerja BPK masih parsial dari dulu Pak ya. *Image* masyarakat bahwa pendekatannya terlalu parsial dan tidak menyentuh substantif ...(suara tidak jelas)... di halaman 11 ini Pak Daniel coba, solusi dan strategi penyelesaian permasalahan ...(suara tidak jelas)... di halaman 11 poin yang kelima itu. Solusi dan strategi penyelesaian permasalahan, tuntutan masyarakat atas peranan dan kinerja BPK dari tahun ke tahun meningkat, tapi disini dicantumkan lagi masyarakat masih mempersepsikan bahwa pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban kinerja Pemerintahan baik pusat maupun daerah belum akuntabel dan transparan. Dan juga ini ada mitos Pak Daniel bahwa predikat BPK dengan wajar tanpa pengecualian dia tidak memiliki korelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ini selalu selalu dan selalu didiskusikan, WTP tetapi kita semakin susah, kesenjangan semakin melebar, orang miskin masih bertambah banyak, itu Pak.

Jadi, saya tambah disini lagi Pak di alinea yang keatas dari akumulasi pencapaian indikator *outcome*, saya tambah lagi dengan *impact* nya. Itu aja Pak Daniel.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Achmad Hatari.

Waktu Pak Daniel Lumban Tobing masih 21 menit, silakan.

CALON ANGGOTA BPK RI (Ir. DANIEL LUMBAN TOBING):

Terima kasih Pimpinan.

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas masukan karena selama ini memang kalau saya lebih condong ke sektor riil Bapak Pimpinan, Bapak anggota dewan, jadi yang pertama kalau saya ungkapkan kalau tadi dari rekan saya Nasdem Pak Achmad Hatari menanyakan, saya akan mencoba menjawab secara global, yaitu tuntutan masyarakat atas peran dan kinerja dari tahun ke tahun semakin meningkat dimana masyarakat masih ...(suara tidak jelas)... pertanggungjawaban kinerja Pemerintah baik pusat masih belum transparan. Ya seperti kita ketahui bahwa pada saat ini seringkali daerah yang mendapat WTP tiba-tiba kepala daerahnya ditangkap korupsi, jadi ini adalah salah satu contoh betapa masyarakat itu seringkali mempertanyakan kenapa kok daerah yang dapat WTP tapi kepala daerahnya ditangkap korupsi. Jadi disini ada suatu pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang mempertanyakan “benar *ga* sih penilaian BPK” contohnya seperti itu Pak. Jadi ini memang malah ada beberapa WTP *ga* lama kemudian ditangkap,

nah ini pengertian masyarakat mempertanyakan kredibilitas daripada penilaian BPK itu sendiri.

Nah kemudian, kalau kita kenapa saya menekankan kinerja pada saat ini, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa yang namanya laporan pemeriksaan keuangan itu hanya menyampaikan opini jadi kedepan itu dari tiga daripada kewenangan pemeriksaan ini kenapa saya tekankan pemeriksaan kinerja, contohnya yang paling simpel itu misalnya ketika BPK itu melakukan pemeriksaan terhadap rumah sakit umum daerah, dan ini yang selama ini kan mungkin hanya dilihat laporan keuangannya tapi bagaimana dengan kinerja yang biasa kita sebut dengan 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektivitas), contohnya ekonomis dan biasanya hanya dilihat efisiensi tentang pembelian obat dan juga bagaimana tiba-tiba obatnya kaldaruasa. Dan ini yang seringkali tidak dimasukkan di dalam suatu standar daripada kinerja daripada RSUD itu sendiri.

Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat kenapa saya mau masuk di BPK ini sebenarnya ketika saya di Komisi VI itu saya mengambil contoh yang langsung di depan mata saya itu ketika bagaimana BUMN itu membuat suatu proyek, kebetulan dapil saya Bekasi dan Purwakarta, dia membuat mungkin ada teman-teman kalau lewat jalan tol dari Cawang ke Bandung, ah Pak Lili ini teman saya lama di Komisi VI, itu pertanyaan saya ketika membuat tol *elevated* cikampek itu saya pikir bagus, tetapi ketika saya tanya lebih lanjut bayangkan dia masuknya dari tol Pondok Indah itu keluarnya di Karawang dan tidak ada pintu keluar lagi. Jadi bayangkan dia masuknya dari tol Pondok Indah, kalau mungkin ada teman-teman lewat tol cikampek itu dari Bekasi kilometer 11 munculnya kurang lebih 45 kilometer jadi 30 kilometer lebih itu hanya di atas terus dan tidak ada pintu keluar, dan saya tidak membayangkan antara tol yang kedua ini, itu kalau nanti teman-teman lewat itu tidak bisa bersambung dan lebih parahnya itu seketika saya tanyakan itu biayanya luar biasa mahal Pak, itu per kilometer itu hampir 500 Milliar.

Nah ini yang membuat saya menggelitik pertama kalau Bapak lihat ini jalan tol itu di atas itu cuman dua jalur dua jalur, pada waktu saya tanya ke Kementerian BUMN dan Dirut Jasa Marga pada saat itu, dia katakan bahwa tanahnya susah, jadi alasan-alasan ini yang makanya saya bilang ini kita harus mengaudit kinerjanya ini, saya ambil simpel yang BUMN ini, ternyata kalau kita lihat itu dia punya dua jalur cuma jadi total empat jalur dibuat, ketika kalau Bapak lihat itu beton *segede-gede* gitu itu sudah bisa kalau buat dibawah bisa satu jalur satu jalur Pak. Jadi kalau melihat efisiensinya ini ataupun kegunaannya ini bayangkan mengeluarkan uang sampai puluhan triliun tetapi yang bisa menggunakan masuk dari kilometer 11 keluarnya 40 jadi 35 kilometer itu di atas tanpa pintu keluar, andaikan kalau tiba-tiba macet total *ga* bisa balik dia.

Ini salah satu contoh simpel betapa peran BPK ini sangat dibutuhkan ya, dari hal seperti ini saya pikir ini contoh bukan hanya di BUMN apalagi kita lihat sekarang kalau kemarin kita rapat itu ...(suara tidak jelas)... BUMN itu setiap tahun itu dikeluarkan sekitar hampir 200 triliun setiap tahun. Nah inilah yang membuat saya karena ketika saya hampir tujuh tahun di BUMN ketika berbicara mengenai terhadap

laporan keuangan, kinerja BUMN ini, ini saya *ga* dapat wewenang. Dan ini saya lihat itu yang mengatakan kalau kembali lagi tadi yang soal simpel prof mengatakan *agency theory* itu, itu yang saya katakan disinilah BPK yang mendapat wewenang daripada *principal* itu sendiri, itu bisa mempertanyakan langsung. Contohnya yang tadi Jasa Marga itu, saya sampai sekarang tidak habis pikir bayangin tanpa pembebasan tanah, harga per kilometer itu jalan tol 500 miliar, per kilometer loh. Saya mempertanyakan sebagai DPR Bapak Pimpinan, itu *ga* dijawab dan selesai aja begitu. Jadi hal ini benar-benar bagi saya ya, itulah makanya saya katakan Pemerintah tidak mampu didalam perencanaan, saya tanyakan jadi sebenarnya pada saat itu kenapa itu dibuat, saya tanyakan itu dikarenakan dibidang kalau nanti pada waktu lebaran itu macet total dia bilang begitu, jadi dibutuhkan lah tol *elevated* ini sehingga bisa memecah kemacetan itu, padahal dari hari ke hari karena itu dapil saya, saya bilang pada Pemerintah ini yang macet itu cuma sampai Cikarang, gaperlu sampai sana, yang harusnya dilakukan adalah kalau mau bikin *elevated* dari Pondok Indah sampai Cikarang, Cikarang itu dibawah sehingga kalau saya hitung itu tidak perlu sampai puluhan triliun, mungkin bisa cuma 60% nya. Jadi bayangkan berapa banyak yang bisa kita *save* hanya dalam satu titik yang kita lakukan.

Bapak Ibu, memang saya sebagai kalau dikatakan tadi ada ditanya *engineer* dengan auditor, tadi saya katakan saya 15 tahun di dalam *manufacturing electronic* dan ketika memang saya *inform* di dalam audit keuangan ini memang korporasi memang mungkin skemanya berbeda tetapi standar-standar dari pemeriksaan itu saya pikir mungkin Pak ...(suara tidak jelas) lebih pintar lah. Jadi kurang lebih standar umumnya, standar pemeriksaannya, dan ...(suara tidak jelas)itu saya pikir secara sistematis sama, dan inilah yang ingin saya sampaikan bahwa masih banyak hal terutama hal-hal seperti ini dari segi ...(suara tidak jelas) mikro, bukan memandang makro, ini bisa kita masukkan bisa kita melakukan perbaikan bisa kita menyelamatkan keuangan negara dan kinerja seperti yang saya katakan 3E itu yaitu Ekonomis, Efisien, dan Efektivitas. Kenapa tadi saya katakan pemeriksaan kinerja itu karena memang hasilnya merupakan kesimpulan dan rekomendasi, disinilah saat ini yang saya lihat jarang ada rekomendasi daripada BPK ini yang benar-benar langsung bisa dikerjakan oleh apa namanya Pemerintah, malah simpang siur.

Bapak Ibu, izinkan saya minum dulu saya lagi agak batuk. Jadi ini yang sebenarnya, saya ingin lakukan di dalam apa namanya jikalau saya diberi kepercayaan oleh Bapak Ibu sekalian, ingin sekali saya melakukan hal-hal seperti ini yang dari mikro-mikro inilah ya kemudian kita buat kedepannya itu ya karena memang *background* saya biasa di *manufacturing*, dari hal yang kecil-kecil itu nanti yang akan saya tata supaya baik itu kemampuan SDM auditornya akan menghasilkan suatu rekomendasi-rekomendasi yang tepat guna kepada Pemerintah secara langsung. Mungkin itu yang global Pimpinan, cukup.

KETUA RAPAT:

Masih ada waktu 10 menit jadi, 9 menit, ada yang mau tanya? Atau kalau sudah saya sudahi. Cukup ya? Baik terima kasih Pak Daniel atas, *closing*? Ya silakan.

CALON ANGGOTA BPK RI (Ir. DANIEL LUMBAN TOBING):

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak Pimpinan Komisi XI, Bapak Ibu Anggota Dewan Komisi XI yang terhormat.

Terima kasih sekali lagi mungkin tadi jawaban saya tidak memuaskan tetapi saya pasti akan memuaskan Bapak Ibu anggota dewan Komisi XI pada hari-hari yang akan mendatang. Bagi saya *customer* BPK itu adalah Komisi XI dan tentunya saya sebagai *customer* harus kita layani dengan baik, seperti *agency theory* Bapak Ibu adalah *principal* dan saya hanya ditunjuk tentunya saya akan sering main ke ruangan Bapak Ibu untuk menerima masukan-masukan di dalam memperbaiki BPK kedepan selanjutnya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kalau yang harus dipuasin tuh istri yang di rumah Pak harus dipuasin.

Baik terima kasih Pak Daniel sudah hadir pada *fit and proper* semoga bisa menjadi masukan buat Bapak-Bapak dan Ibu disini untuk mengambil keputusan. Terima kasih atas kehadirannya. Rapat saya skors.

(RAPAT DISKORS)

(SKORS DICABUT)

Selamat Malam Pak Wilgo Zainar, terima kasih sudah datang pada undangan kami untuk mengikuti *fit and proper* sebagai calon anggota BPK. Bapak memiliki waktu 45 menit, 15 menit menyampaikan pemaparan, 15 menit teman-teman menyampaikan pertanyaan, 15 menit Bapak menjawab pertanyaan. Kami persilakan Pak Wilgo sekarang jam 21.31. Silakan Pak.

CALON ANGGOTA BPK RI (H. WILGO ZAINAR, S.E., M.B.A.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam,

**Salam sejahtera,
Salam kebangkitan,
Salam kebangsaan,
Om Swasti Astu.**

Alhamdulillah wa syukurillah pada malam yang baik ini, Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat berkenan untuk melakukan satu tugas konstitusi, melakukan *fit and proper test* terhadap seluruh calon anggota BPK RI, tidak terkecuali diri kami pada malam hari ini.

Pimpinan dan anggota Komisi XI yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin mengambil satu tema masalah terkait dengan pengelolaan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan rakyat perspektif akuntabilitas keuangan negara. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis berbagai aspek permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas atas pengelolaan dana desa. Hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan dalam pengelolaan dana desa sebagaimana yang diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa masih memiliki berbagai permasalahan, apabila dilihat pada aspek regulasi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi peran pengawasan pengelolaan keuangan desa terutama yang dilakukan oleh BPK RI sebagai lembaga audit negara, *supreme audit institution*. Memiliki peran yang penting dalam menelisir berbagai potensi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana desa. Dengan demikian, pengalokasian dana desa akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan di wilayah pedesaan.

Baik, dalam uraian makalah ini kami ingin membagi dalam lima pokok pembahasan, yang pertama adalah pendahuluan, kedua maksud dan tujuan, tiga metodologi, empat aspek permasalahan pengelolaan dana desa, lima kesimpulan dan saran. *Next*, pendahuluan, Pemerintah bersama DPR membentuk suatu Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Dana Desa. *Next*, kehadiran undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada desa untuk mengurus tata Pemerintahannya sendiri termasuk pengelolaan keuangannya serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan ...(suara tidak jelas) dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah melalui RPJM 2015-2019 telah menetapkan program pembangunan nasional yang disebut dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Sebagaimana pelaksanaan RPJM tersebut, Pemerintah pusat telah melaksanakan penyaluran dana desa dalam APBN sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 sekitar 127,3 triliun, sedangkan tahun 2018 dan 2019 alokasi anggaran dana desa masing-masing 60 dan 70 triliun sehingga sampai dengan tahun 2019 ini berjumlah sekitar 257,3 triliun. Peningkatan realisasi dan pengalokasian dana desa sebagaimana digambarkan diatas mengharuskan Pemerintah desa mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaannya. Hal ini tidak lain

menunjukkan komitmen Pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus Pemerintahannya agar dapat mewujudkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung Pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Komitmen Pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan bagian dari kerangka konseptual akuntansi Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 bahwa Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas ... sebagai proses pengelolaan keuangan daerah melalui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan terkait dengan kegagalan maupun keberhasilan sebagai bahan evaluasi di tahun anggaran berikutnya. Jadi penggunaan dana desa untuk beberapa hal yang sudah sesuai dengan undang-undang yakni penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil evaluasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh BPK RI pada tahun anggaran 2016 diungkapkan beberapa jenis temuan yang memuat permasalahan meliputi kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah penggunaan DD diluar sidang prioritas, pengeluaran DD tidak didukung dengan bukti yang memadai, pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai. Desa belum mengenal mekanisme Uang Persediaan sehingga dana yang telah disalurkan ke rekening desa ditarik dan disimpan diluar rekening desa dan mengandung tindak pidana seperti penggunaan DD untuk kepentingan pribadi, dan saat ini sudah menjadi *trend* beberapa kepala desa terjerat dengan masalah hukum yang sedang berhubungan dengan aparat penegak hukum.

Next, maksud dan tujuan penulisan, berdasarkan uraian dan data diatas maka usaha mewujudkan tata kelola keuangan di tingkat Pemerintah desa, *good village governance*, perlu menjadi perhatian khusus bagi *public stakeholder* dengan cara mengidentifikasi keseluruhan permasalahan dan merumuskan kebijakan penyelesaiannya, serta melakukan pengawasan secara berkala. Tulisan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus menganalisa berbagai aspek permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas atas pengelolaan dana desa sejak pertama dilakukan pencairan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Diharapkan substansi tulisan ini dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan pada *public stakeholder* terutama BPK RI dalam melaksanakan tugasnya mengawal dan memastikan bahwa dana desa sebagai bagian dari keuangan negara dikelola secara benar sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas pada aspek penilaian dan kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian diharapkan jalannya pengawasan yang

baik dan berkala dapat meminimalisir berbagai potensi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana desa tersebut.

Metodologi penulisan, tulisan ini disusun dengan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran dan melakukan identifikasi terhadap aspek-aspek yang dinyatakan sebagai permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis dokumen yang bersumber dari hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan pemeriksaan kinerja dan laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu baik terhadap Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan dana desa.

Next, aspek permasalahan pengelolaan dana desa. Secara umum, berdasarkan hasil pengkajian penulis mengenai permasalahan pengelolaan dana desa sejak 2015 sampai dengan 2018 dapat diklasifikasi pada tiga aspek yakni: Aspek Regulasi, Aspek Pelaksanaan, dan Aspek Pertanggungjawaban. Adapun berbagai permasalahan dapat ditinjau dari aspek-aspek tersebut dapat diuraikan sebagaimana yang telah tertera diatas. Aspek regulasi, permasalahan pengelolaan dana desa apabila ditinjau dari aspek regulasi diantaranya, pertama, ketidaksinkronan regulasi antara peraturan menteri dengan peraturan Pemerintah, Permendes PDTT No. 3 tahun 2015 masih mengacu pada PP No. 43 tahun 2014 dimana telah diubah menjadi PP No. 47 tahun 2015. Di sisi lain, Permendes PDTT telah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendamping desa dengan landasan hukum PP No. 47 tahun 2015. Kedua, belum adanya suatu acuan pengukuran status desa, ketersediaan informasi dan data desa belum mendukung efektivitas program pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Terdapat dua jenis pendekatan yang digunakan dalam pengukuran status desa yaitu pengukuran status desa berupa indeks desa membangun, dikembangkan oleh Kemendes PDTT dan indeks pembangunan desa dikembangkan oleh Bappenas. Selain itu data Potensi Desa (PODES) belum dibangun dengan sistem informasi desa tunggal yang terintegrasi sehingga tidak mencakup ...(suara tidak jelas) elemen pengukuran status desa seperti menggambarkan kondisi infrastruktur kesehatan maupun pendidikan. Ketiga, isu kesejahteraan tenaga pendamping profesional, penentuan besaran dan komponen biaya tenaga pendamping profesional pada kontrak kerja belum mencukupi kebutuhan operasional dalam rangka pendamping desa. Aspek pelaksanaan, permasalahan pengelolaan dana desa apabila ditinjau dari aspek pelaksanaan diantaranya, pertama, kurang optimalnya koordinasi pembangunan desa antara Pemerintah pusat dengan daerah, hal ini dapat ditunjukkan pada koordinasi antara Kemendes PDTT dengan Pemerintah daerah yang diantaranya menghasilkan ketidaksesuaian pemberian bantuan kawasan pedesaan dengan kawasan pedesaan ditetapkan oleh Pemerintah daerah kabupaten. Kedua, kurangnya kuantitas dan kualitas pendamping desa, jumlah tenaga pendamping profesional belum dapat memenuhi nasional yang telah ditetapkan karena hasil rekrutmen TPP belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan ketika diberlakukannya penilaian rekrutmen berdasarkan sistem *passing grade* pada tahun 2015, 2016, sebagaimana permintaan *world bank* sebagai negara pemberi

pinjaman, selaku pemberi pinjaman. Sedangkan permasalahan kurangnya kualitas pendamping ditunjukkan dengan beberapa kasus dimana perencanaan APBDes tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, yang disebabkan PLD (Pendamping Lokal Desa) tidak melakukan pendampingan sesuai dengan pedoman bagi PLD dalam memfasilitasi desa.

Selanjutnya Aspek pertanggungjawaban, dalam aspek ini dapat ditunjukkan permasalahan tentang kurang optimalnya pembinaan dan pendampingan aparatur desa. Permasalahan pembinaan dan pengawasan aparatur desa juga menjadi isu pada pemeriksaan BPK RI atas kinerja efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa pada IHPS kedua 2018. Beberapa kendala dalam pengoptimalan pembinaan dan pengawasan antara lain keterbatasan jumlah personil dan anggaran yang melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan baik di level Pemerintah dan Pemerintah daerah termasuk kecamatan.

Next, kesimpulan dan saran pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan identifikasi dan hasil pemetaan permasalahan pengelolaan dana desa sebagaimana uraian diatas maka pengelolaan desa apabila dilihat pada aspek regulasi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, masih memiliki berbagai permasalahan sehingga perlu disusun langkah-langkah strategis dalam dalam usaha perbaikan di masa mendatang. Upaya perbaikan tata kelola dana desa diperlukan suatu sinergisitas dan sinkronisasi regulasi utamanya antara kementerian yang berperan langsung atas tata kelola dana desa. Sinkronisasi regulasi diperlukan terutama pada aspek klasifikasi bidang prioritas penggunaan dana desa. Selain sinkronisasi regulasi, juga perlu dilakukan langkah integrasi atas implementasi regulasi-regulasi tersebut pada satu sistem, hal ini disebabkan sistem-sistem yang telah ada dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa masih tidak terintegrasi satu sama lain dan berpotensi tidak optimal. Akhirnya regulasi dan sistem yang mumpuni akan dapat dilaksanakan dengan baik bila didukung oleh kecukupan jumlah maupun kualitas dari sumber daya manusia yang menjalankan aturan dan sistem tersebut. BPK RI sebagai audit negara, *supreme audit institution*, memiliki peran penting dalam upaya perbaikan pengelolaan dana desa khususnya pada aspek-aspek yang telah dipetakan pada pembahasan diatas sebagai permasalahan dalam pengelolaan dana desa, sehingga jalannya pengawasan yang baik dan berkala dapat meminimalisir berbagai potensi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana desa tersebut. Begitu juga tidak kalah penting adalah melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik pada level pusat maupun daerah serta tingkat kecamatan yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana desa dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif sehingga mampu memberikan *output* dan *outcome* yang berkelanjutan. Apabila langkah perbaikan diatas dilakukan, maka dana desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan, dengan kata lain akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Demikian Ketua dan seluruh anggota yang terhormat pemaparan kami.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Wilgo.

Sekarang teman-teman Komisi XI bertanya. Kita kasih Heri Gunawan dulu ya.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Wilgo yang saya hormati.

Terima kasih Pak Wilgo, Pak Wilgo satu catatan nih Pak Wilgo, yang saya baca disini bahannya kok kebanyakan dana desa Pak Wilgo, sementara kita ketahui di BPK itu kan ada banyak bidang Pak Wilgo, ada anggota I sampai IX kurang lebih. Ini saya melihat Pak Wilgo membedah dana desa, yang pasti yang ingin saya coba tanyakan Pak Wilgo, jikalau Pak Wilgo terpilih menjadi anggota BPK kira-kira langkah strategis apa Pak Wilgo yang akan Pak Wilgo lakukan. Kenapa? Karena seperti kita ketahui ada beberapa pemeriksaan yang tahun 2008, 2017 seperti pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti itu jumlahnya kurang lebih ada 4000an, sementara di 2018 di IHPS semester II itu sudah mencapai 5300 kurang lebih naik 30%. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah alasan jikalau berhubungan dengan Renstra ataupun kementerian yang dibentuk oleh Pemerintah yang berbeda gitu. Sementara di satu sisi BPK sendiri mendapat penguatan ada empat undang-undang yang melingkupi di dalamnya dari mulai Undang-Undang 17 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 15 tentang Pemeriksaan, dan Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang BPK itu sendiri. Saya ingin tau Pak Wilgo, kira-kira rencana apa ataupun peran strategis apa yang akan dilakukan dalam kaitannya BPK yang kita kaitkan dengan tujuan bernegara seperti itu Pak Wilgo. Saya pikir mungkin hanya satu, mohon dapat dijelaskan agar kita memperoleh gambaran lebih jelas, begitu loh Pak Wilgo. Kalau untuk gambaran dana desa mungkin kami di Komisi XI relatif sangat jelas begitu loh Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Pak Purnamasidi.

F-PG (H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI):

Ya terima kasih.

Pak Wilgo yang saya hormati.

Terkait dengan makalah Bapak yang menitikberatkan untuk bagaimana mengefektifkan pengawasan penggunaan dana desa, tentu kita ketahui hari ini struktur organisasi BPK kan baru sampai tingkat provinsi, dengan personil auditor yang memang menurut data yang disampaikan oleh BPK ke kita, ke Komisi XI, itu sangat minimalis. Karena itu saya ingin dapat gambaran dari Pak Wilgo terkait dengan *problem* ini, apa solusinya gitu, kenapa karena ketika kita mengawasi berarti harus ada personil harus ada struktur organisasi yang memang mencerminkan bahwa itu bisa kita lakukan. Mungkin nanti kalau Pak Wilgo terpilih kira-kira solusinya seperti apa sehingga idealitas dari yang disampaikan tadi itu bisa kita capai.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ibu Tuti.

F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M., M.Kes.):

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

Pak Wilgo yang sangat saya hormati.

Pak, disini Bapak kan pernah duduk di Komisi XI ya, rupanya Bapak sangat *concern* sekali dengan dana desa. Saya ingin menanyakan Pak tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan, karena ini merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemeriksaan Pak. Kita tau bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah daerah juga merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh entitas. Namun yang saya ketahui sekarang banyak sekali rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pemda. Nah seandainya nanti Bapak terpilih sebagai anggota BPK, bagaimana atensi dan terobosan BPK untuk Pemerintah daerah yang tidak melaksanakan tindak lanjut tersebut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Nizar.

F-P. GERINDRA (H. MOH. NIZAR ZAHRO):

Terima kasih Ketua.

Pak Wilgo yang sangat saya hormati.

Dari makalah Bapak, saya agak tertarik karena mengupas habis tentang dana desa terutama dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Salah satu *problem* yang sekarang menjadi nasional adalah penggunaan dana desa itu kadangkala menimbulkan reaksi dan aksi, menimbulkan hal-hal yang tidak sama antara Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten, dan Pemerintah desa. Contoh misalkan, dana desa itu diwajibkan oleh Kementerian Keuangan di semester I bulan satu atau bulan dua, harus masuk ke Pemerintah kabupaten. Akan tetapi praktek yang ada, Pemerintah kabupaten itu akan memberikan dana desa itu setelah enam bulan, kenapa setelah enam bulan? Karena dimasukkan deposito dulu, kenapa masuk deposito? Baru dia menjadi PAD dari Pemerintah kabupaten, yang kedua kadangkala gaji kepala desa dibawah UMR, ini yang sampai sekarang masih belum dirubah, makanya entitas dari dana desa itu bukanlah Kementerian Keuangan saja, juga termasuk Kementerian Dalam Negeri, termasuk Bappenas, Kementerian Desa, dan juga Pemerintah desa. Yang Bapak *concern* disini, saya ingin tanya kalau memang konsentrasi Bapak sebagai calon anggota BPK mengupas habis dana desa, harus dipotong habis dari beberapa birokrasi yang saya sebut tadi, karena uang desa itu benar ada dari Kementerian Keuangan bahkan seperti di provinsi Jogja itu masuk bulan satu, bulan dua sudah disampaikan ke Pemerintah desa. Ada di sebuah kabupaten di Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu bulan satu sudah masuk, baru dibagikan oleh Pemerintah kabupaten itu bulan enam bulan tujuh, seperti di dapil saya karena ada kepentingan deposito yang harus masuk ke PAD. Pertanyaan terakhir, kalau memang tujuan untuk meningkatkan dana desa itu adalah untuk membangun pinggiran dari kota, langkah apa yang akan Pak Wilgo laksanakan bila nanti terpilih menjadi anggota BPK 2019-2024.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Pak Erik.

F-P. HANURA (ERIK ADTRADA RITONGA):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Wilgo yang terhormat.

Pengelolaan dana desa mana yang baik menurut Bapak sehingga tidak ada lagi dana desa itu yang bisa diselewengkan sehingga banyaknya sekarang ini kepala-kepala desa menjadi diperiksa oleh aparat penegak hukum, dan juga seperti kita ketahui di BAKN sendiri Bapak juga sebagai anggota BAKN, dari beberapa kali

kita kunjungan bahwasanya ada permasalahan SDM desa. Apabila Bapak terpilih sebagai anggota BPK, setahun atau dua tahun kah Bapak bisa menyelesaikan permasalahan dana desa ini sehingga penggunaan dana desa ini bisa dirasakan oleh masyarakat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya persilakan Pak Haerul.

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Wilgo yang saya hormati.

Pak Wilgo, ini anda ini merupakan *one of my reasons* kenapa saya *ga* maju lagi, *ga* melanjutkan maju sebagai calon BPK salah satu alasannya itu adalah Pak Wilgo. Saya anggap Pak Wilgo dan Pak ...(suara tidak jelas) menurut saya memiliki kapasitas yang jauh lebih dibanding saya dan paparan tadi memang baik dan hanya saja begini, bagi saya sebagus apapun paparan anda, kalau tidak dimulai dengan niat yang baik dan tujuan yang baik ya saya yakin semuanya itu hanya omong doang ibaratnya begitu. Nah sekarang saya mau tanya, sebetulnya apa yang menjadi landasan dan niat Bapak Wilgo ini maju sebagai anggota BPK RI, jangan sampai ini hanya merupakan pelarian saja gitu.

Ya saya kira itu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kenapa *ga* maju aja Pak Haerul. Sudah tutup?
Pak Hatari silakan.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat calon anggota BPK, Pak Wilgo.

Memang tata kelola ini terus menjadi isu yang mengemuka, memiliki implikasi terhadap pertumbuhan, juga pengendalian inflasi, karena memang dana desa ini sarat intervensi kepala daerah, itu harus diakui dan karena itu Pemerintah perlu mengubah skema tentang penyalurannya ke desa. Peraturan bersama tiga menteri itu setelah tujuh hari diterima di kas kabupaten langsung disalurkan ke desa tapi

ternyata tidak seperti begitu apalagi kalau ibarat kantor bupati itu ada di Bandung, di kota Bandung, sementara desanya itu ada di Jakarta, Bapak bisa bayangkan bagaimana dia itu. Dengan luas wilayah kurang lebih 82,69% di dapil saya. Karena itu Pemerintah perlu mengubah skema penyaluran dari kas kabupaten ke desa. Sarat dengan intervensi kepala daerah tentang, belum lagi polisi ikut campur tangan. Jadi menarik ini Pak Haji punya *paper* tapi kira-kira kesimpulan sementara saya begitu. Rumit Pak dan dia terus bergulir menjadi isu yang mengemuka.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ibu Indah.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Wilgo yang saya hormati.

Bapak menyampaikan tentang pengelolaan dana desa tapi saya mau ngomong secara umum saja Pak. Kandidat yang sebelumnya menyampaikan bahwa tindak lanjut hasil pemerikasaan BPK itu merupakan ujung kesuksesan penguatan nilai-nilai dasar BPK dan proses pemeriksaan BPK, bahkan disebut sebagai mahkota pemeriksaan. Nah dikaitkan dengan masih rendahnya tindak lanjut yang dilakukan oleh entitas, kira-kira kalau Pak Wilgo nanti terpilih sebagai anggota BPK, apa yang bisa Pak Wilgo lakukan sekaligus juga akan memposisikan dimana hasil atau *output* dari entitas yang diperiksa itu, kalau dia mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, selama ini kita tau bahwa meskipun entitas itu mendapatkan WTP berturut-turut masih ditemukan juga tindak pidana korupsi bahkan OTT. Nah kira-kira Pak Wilgo apa yang Bapak lakukan untuk mencemirkan WTP itu adalah sebagai wujud dari *clear governance* kemudian profesional, *accountable*, dan lain sebagainya.

Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Tidak ada lagi?

F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi.):

Pimpinan satu lagi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, bu Siti silakan.

F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Pak Wilgo yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian.

Saya ingin menanyakan satu hal saja yang kaitannya dengan, kalau kita berbicara BPK berarti berbicara tentang audit, jadi saya ingin menanyakan adakah pengalaman Pak Wilgo di bidang audit, karena meski kita tau semua bahwa pelaksana teknis pasti ada dibawah Pak Wilgo nanti tapi minimal Pak Wilgo punya kemampuan untuk melihat celah-celah mana yang menjadi sasaran atau celah mana yang digunakan oleh para oknum ini untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan. Nah ini harus dipahami karena kalau tidak, bagaimana Bapak bisa memimpin mereka dengan nantinya BPK sendiri menjadi WTP gitu.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Wilgo masih ada 12 menit lagi untuk Bapak jawab ya. Silakan Pak Wilgo.

CALON ANGGOTA BPK RI (H. WILGO ZAINAR, S.E., M.B.A.):

Terima kasih Ketua.

Terima kasih kepada anggota yang terhormat yang mencoba untuk memberikan beberapa tanggapan dan pertanyaan kepada saya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Indah tadi bahwa tindak lanjut adalah mahkota dari BPK itu sendiri. Memang kita pahami bahwa terkait dengan tindak lanjut ini karena mungkin ya BPK itu tidak memiliki satu *power law of enforcement* sehingga tidak punya kekuatan untuk memaksa karena ini adalah ranahnya daripada institusi yang lainnya. Nah tentu untuk memberikan suatu *power law of enforcement* tentu mungkin ada penyempurnaan, revisi, atau penguatan daripada undang-undang itu sendiri dan undang-undang itu tentu kembali kepada Bapak dan Ibu yang terhormat di Komisi XI dan DPR RI secara umumnya. Nah yang kedua, tadi disampaikan kenapa saya lebih fokus kepada masalah dana desa, karena memang dana desa ini satu produk undang-undang yang baru di era Pak Jokowi ini 2015 dimulai walaupun undang-undang desanya sebelumnya sudah ada cuman mulai dari

pengucuran dananya itu mulai 2015. Dan yang kedua dana desa ini begitu seksi, sehingga hampir seluruh aparat penegak hukum turun bergotong royong apakah kepolisian, kejaksaan, sampai dengan KPK sekalipun juga mengintip tentang pelaksanaan penggunaan pengelolaan dana desa selain dari pengawasan-pengawasan yang dilakukan secara internal oleh APIP, BPKP, dan kemudian juga ada BPK RI.

Nah yang ketiga, karena memang ini adalah suatu prioritas dari Pemerintah saat ini sebagaimana yang termaktub dalam nawacitanya, membangun Indonesia dari pinggiran dan desa. Saya kira kenapa saya mengangkat tema ini karena mungkin banyak persoalan di BPK dalam konteks hubungan dari beberapa pembedangan-pembedangan lainnya, tetapi saya izinkan untuk lebih *zoom* lebih fokus kepada terkait dengan masalah dana desa.

Nah hal yang lain tadi ditanyakan apakah saya memiliki pengalaman praktis sebagai auditor, saya sampaikan tidak. Saya hanya latar belakang ekonomi S1, S2 saya adalah pendidikan di Berkeley California bidangnya pun tidak bidang terkait dengan akuntansi. Tetapi saya berkeyakinan dengan pengalaman 4,5 tahun menjadi santri, menjadi salah satu anggota Komisi XI DPR RI, dan hampir lima tahun menjadi Kapoksi dan anggota badan anggaran DPR RI, dan saat ini 1,5 tahun berjalan menjadi wakil ketua BAKN tentu saya banyak belajar dari teman-teman, dari Bapak Pimpinan, dan seluruh anggota berkompeten yang tentunya kita akan tetap *sharing* pada posisi kita nantinya. Apakah nantinya tentu pengalaman praktis menjadi penting iya, tetapi lebih penting lagi ada keinginan kita untuk kemudian belajar kemudian memberikan energi baru bagi BPK yang ada saat ini.

Kemudian pertanyaan Pak Haerul, apakah yang menjadi motivasi saya. Yang pertama tentu secara terbuka kami katakan ada *opportunity*. Pada periode ini BPK sudah habis masa bakti lima orang anggota, jadi kami mencoba kalau memang ada peluang kami dan sesuai dengan kapasitas yang diharapkan oleh Pimpinan dan anggota tentunya kami akan berkiprah ya. Harapan itu tentu tidak dengan bekal kosong, kami juga hadir dengan sedikit latar belakang pengalaman dan pengetahuan ditambah dengan semangat untuk menjadi energi baru dari *existing* anggota BPK yang ada dengan segala auditor-auditor yang mumpuni.

Kemudian ada pertanyaan lainnya lagi tadi Pak Purnamasidi bahwa apakah saat ini BPK memiliki secara sumber daya manusia nya auditornya masih agak kurang ya Pak ya. Saya kira iya Pak itu permasalahannya tetapi BPK juga tentu memiliki hak untuk meng-*hire* eksternal auditor yang bisa diperbantukan bila dipandang penting untuk hal-hal tertentu yang strategis ya. Jadi BPK bisa merekrut dari dalam dan juga bisa melibatkan secara eksternalnya.

Kemudian Bu Tuti hampir sama juga tadi terkait dengan masalah tindak lanjut ya Pak Tuti ya kita harus memberikan suatu *law enforcement* kepada BPK juga agar BPK menjadi suatu BPK baru yang memiliki kekuatan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan selain diserahkan kepada presiden, diserahkan kepada DPR, dan tentunya presiden dan DPR juga bisa melakukan tindak lanjut sebagaimana yang dimaksud oleh BPK.

Kemudian Pak Erik, apakah ada bagaimana prinsip-prinsip yang perlu dilakukan agar kemudian dana desa ini bisa ekonomis, efisien, dan efektif ya sampai kepada tujuannya ya tentu mulai dari aparat desa harus memiliki bekal kemampuan baik secara manajerialnya, kemudian pendamping desa juga memiliki bekal kemampuan untuk sesuai dengan koridor peraturan dan perundang-undangannya, dan juga penguatan dari sisi pengawasannya, bukan hanya APIP, bukan hanya BPKP, BPK, tapi juga sampai tingkat kecamatan juga pun harus diperankan lebih aktif lagi. Saya kira itu salah satu solusinya.

Prof. Hatari terima kasih Prof memang kita berharap hampir sama dengan yang disampaikan oleh bang Nizar Zahro bahwa perlu adanya *shortcut* dari dana Pemerintah pusat langsung masuk ke rekening desa sehingga tidak ada lagi modus dana desa disimpan untuk dihasilkan bunga deposito menjadi PAD bagi Pemerintah kabupaten. Saya kira ini masukan yang luar biasa, kiranya nanti saya mendapat peran itu tentu ini adalah hal yang utama dan pertama yang kita harus sampaikan kepada kementerian yang terkait.

Mungkin ada yang lain lagi yang belum saya jawab? Cukup?

KETUA RAPAT:

Apakah masih ada? Oh, ya Pak Erik silakan.

F-P. HANURA (ERIK ADTRADA RITONGA):

Ada Pimpinan. Yang saya tanyakan tadi Pak Wilgo jika Bapak terpilih untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan keinginan daripada kita semua bahwasanya dana desa itu bisa dilaksanakan dengan baik dan hasilnya baik, berapa lama Bapak memperbaiki itu semuanya, apabila Bapak terpilih mungkin satu tahun atau dua tahun atukah memang untuk periode keduanya mungkin atau 10 tahun kan begitu ya. Terima kasih.

CALON ANGGOTA BPK RI (H. WILGO ZAINAR, S.E., M.B.A.):

Terima kasih, izin Pimpinan.

Ya Pak Erik, sebetulnya sudah ada satu rekomendasi agar ada sinkronisasi diantara kementerian dan lembaga yang terkait sehingga dalam pertemuan BAKN bersama BPK telah merekomendasikan agar kemudian nanti ada peraturan bersama ya dari empat kementerian, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, dan Kementerian Keuangan, sehingga juga memudahkan penjewantahan daripada aparat desa dibawahnya, tidak terjadi *confusing* kebingungan yang pada akhirnya berujung kepada ketidakmampuan aparat desa memenuhi daripada peraturan dan perundangan yang telah diatur oleh Pemerintah pusat. *Insyallah as soon as possible*. Lebih cepat lebih baik.

KETUA RAPAT:

Baik.

Pak Wilgo ini semua tergantung Pak Heri Gunawan aja.

CALON ANGGOTA BPK RI (H. WILGO ZAINAR, S.E., M.B.A.):

Siap Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi diselesaikan secara kekeluargaan dan gotong royong. Kalau sesama keluarga sudah selesai, baru yang luar gitu.

CALON ANGGOTA BPK RI (H. WILGO ZAINAR, S.E., M.B.A.):

Siap Ketua. Kita bicara lebih khusus ...

KETUA RAPAT:

Oh iya.

Baik terima kasih Pak Wilgo atas pemaparannya dan mudah-mudahan teman-teman disini bisa memahami apalagi sudah empat tahun lebih di Komisi XI, sudah bisa memahami maunya Pak Wilgo ini, jadi tinggal selesaikan saja sama Pak Heri Gunawan.

CALON ANGGOTA BPK RI (H. WILGO ZAINAR, S.E., M.B.A.):

Siap Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Wilgo.

CALON ANGGOTA BPK RI (H. WILGO ZAINAR, S.E., M.B.A.):

Saya boleh izin pantun Ketua?

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

CALON ANGGOTA BPK RI (H. WILGO ZAINAR, S.E., M.B.A.):

Terima kasih Ketua.

Merah putih kuning hijau dan biru adalah warna-warna, tampak indah serasi bagai pelangi dipandang mata, izinkanlah kami duhai Pimpinan dan anggota, menjadi wakil Komisi XI di BPK.

Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi, kalau ada umur kita sama-sama panjang, bolehlah kita berjumpa lagi di DPR sebagai mitra sejati.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat malam,

Salam kebangsaan untuk kita semua.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Kalau ada umur panjang kita mandi bareng ya Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Heri ada itu tidak puisinya? tidak ada lagi puisi? Ya sudah ya. Kirain Pak Heri ada puisi gitu langsung dijawab itu puisinya.

Baik terima kasih Pak Wilgo dengan demikian rapat kita skors ya? Atau tutup? Kita tutup dan dilanjutkan *fit and proper* besok. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 22.16 WIB)

Jakarta, 2 September 2019

a.n. Ketua Rapat

Sekretaris Rapat

ttd

Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 19620521 198203 1 001